

Analisis Peran Pendidikan Dalam Mengubah Stratifikasi Sosial

Sahlan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ittihadiyah Labuhanbatu Utara, Indonesia

Email: sahlantubara9694@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan cara mengumpulkan literatur yang relevan mengenai stratifikasi sosial, termasuk teori, konsep dasar, dan hasil penelitian empiris sebelumnya. Sumber yang digunakan bisa berupa buku teori sosiologi, jurnal ilmiah, laporan dari lembaga penelitian, serta artikel yang terpublikasi di platform akademik. Kemudian mengembangkan kerangka teoretis dan hipotesis untuk penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendidikan dalam mengubah stratifikasi sosial memiliki empat kegiatan, 1) Pemerataan Akses. Kegiatan ini meliputi, diantaranya: Pemerataan Akses Pendidikan, Pemerataan Akses Layanan Kesehatan, Pemerataan Akses Ekonomi dan Pekerjaan, Pemerataan Akses Perumahan dan Layanan Sosial, Pemerataan Akses pada Keadaan dan Perlindungan Hukum, dan Pemerataan Akses Teknologi dan Informasi. 2) Reformasi Kurikulum. Kegiatan reformasi kurikulum adalah, Memastikan Kurikulum yang Inklusif dan Relevan, Mengintegrasikan Pendidikan Karakter dan Keterampilan Hidup, Mengintegrasikan Pendidikan Vokasional di Tingkat Sekolah Menengah, Menyediakan Akses Pendidikan Digital, Mengurangi Penekanan Pada Prestasi Akademik Semata, Pendidikan Kesadaran Sosial dan Keadilan Sosial dan Memperkuat Pendidikan Guru. 3) Kebijakan Inklusi Sosial. Kebijakan ini meliputi, Kebijakan Pendidikan yang Inklusif, Kebijakan Kesempatan Kerja yang setara, Kebijakan Akses Terhadap Layanan Kesehatan, Kebijakan Perumahan yang Terjangkau, Kebijakan Perlindungan Sosial dan Bantuan Sosial, Kebijakan Partisipasi Politik yang Inklusif, Kebijakan Anti-Deskriminasi dan Kesetaraan Peluang dan Kebijakan Akses Teknologi dan Infrastruktur Digital. 4) Pendanaan dan Beasiswa. Pendanaan dan Beasiswa ini meliputi, Beasiswa Berdasarkan Kebutuhan Ekonomi, Program Pendanaan Sekolah Gratis, Beasiswa Akademik dan Non Akademik, Pendanaan Untuk Pendidikan Vokasional, Beasiswa Untuk Pendidikan Tinggi dan Luar Negeri, Pendanaan untuk Pendidikan Anak Daerah Tertinggal, Program dan Bantuan Subsidi Pendidikan dari Pemerintah, dan Kombinasi Program Beasiswa dengan Pelatihan Keterampilan.

Kata Kunci: Pendidikan, Stratifikasi, Sosial, Stratifikasi Sosial

Analysis of the Role of Education in Changing Social Stratification

ABSTRACT

This study uses a literature study approach by collecting relevant literature on social stratification, including theories, basic concepts, and previous empirical research results. The sources used can be sociological theory books, scientific journals, reports from research institutions, and articles published on academic platforms. Then develop a theoretical framework and hypothesis for the study. The results of the study indicate that the role of education in changing social stratification has four activities, 1) Equal Access. These activities include, among others: Equal Access to Education, Equal Access to Health Services, Equal Access to the Economy and Employment, Equal Access to Housing and Social Services, Equal Access to Legal Conditions and Protection, and Equal Access to Technology and Information. 2) Curriculum Reform. Curriculum reform activities are, Ensuring an Inclusive and Relevant Curriculum, Integrating Character Education and Life Skills, Integrating Vocational Education at

the Secondary School Level, Providing Access to Digital Education, Reducing Emphasis on Academic Achievement Only, Social Awareness and Social Justice Education and Strengthening Teacher Education. 3) Social Inclusion Policy. This policy includes, Inclusive Education Policy, Equal Employment Opportunity Policy, Access to Health Services Policy, Affordable Housing Policy, Social Protection and Social Assistance Policy, Inclusive Political Participation Policy, Anti-Discrimination and Equal Opportunity Policy and Access to Technology and Digital Infrastructure Policy. 4) Funding and Scholarships. This funding and scholarships include, Scholarships Based on Economic Needs, Free School Funding Program, Academic and Non-Academic Scholarships, Funding for Vocational Education, Scholarships for Higher Education and Overseas, Funding for Education of Children in Disadvantaged Regions, Education Subsidy Programs and Assistance from the Government, and Combination of Scholarship Programs with Skills Training.

Keywords: Education, Stratification, Social, Social Stratification

PENDAHULUAN

Stratifikasi sosial merupakan konsep yang menggambarkan pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu, seperti status ekonomi, kekuasaan, pendidikan, dan prestise sosial. Setiap lapisan atau kelas sosial menunjukkan posisi individu atau kelompok dalam hierarki sosial, yang menentukan peran, kesempatan, serta akses mereka terhadap sumber daya.(Pattinasarany, 2016; Yusuf, 2024). Dalam masyarakat, stratifikasi sosial tercipta secara alami seiring dengan adanya perbedaan ekonomi, politik, dan budaya, yang kemudian berkembang menjadi sistem yang memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dan berkembang di dalam masyarakat tersebut.(Maulidar, 2018).

Secara umum, stratifikasi sosial memiliki karakteristik universal, artinya setiap masyarakat cenderung memiliki bentuk stratifikasinya sendiri, meskipun jenis, alasan, dan tingkatannya berbeda-beda.(Maunah, 2015). Sistem stratifikasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengorganisasikan masyarakat tetapi juga sering kali berperan dalam menciptakan dan mempertahankan ketimpangan sosial, yang berakibat pada perbedaan hak dan kesempatan di antara individu atau kelompok. Stratifikasi sosial berperan penting dalam membentuk struktur masyarakat dan memengaruhi distribusi kekuasaan serta kontrol atas sumber daya.(Aji, 2016).

Beberapa faktor utama yang mendasari stratifikasi sosial adalah faktor ekonomi, seperti pendapatan dan kekayaan, pendidikan, status pekerjaan, serta pengaruh dari aspek budaya dan kapital sosial.(Lue & Palupi, 2022). Di berbagai sistem sosial, seperti dalam masyarakat feodal, kapitalis, atau komunis, stratifikasi muncul dengan bentuk yang bervariasi, namun tetap memiliki dampak signifikan terhadap akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial lainnya.(Pattinasarany, 2016).

Studi tentang stratifikasi sosial penting untuk memahami bagaimana struktur masyarakat bekerja serta untuk mencari solusi atas ketidaksetaraan yang terjadi akibat stratifikasi tersebut. Dengan memahami stratifikasi sosial, masyarakat dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan mengurangi jurang perbedaan

antara kelas sosial, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata dalam hal kesempatan dan hak-hak dasar.

Stratifikasi sosial merupakan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas atau lapisan sosial yang didasarkan pada status ekonomi, pekerjaan, kekuasaan, atau faktor sosial lainnya. Masalah yang timbul dari stratifikasi sosial ini berkaitan erat dengan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak yang berdampak pada kesejahteraan hidup individu dan kelompok dalam masyarakat. Masalah-masalah stratifikasi sosial ini membutuhkan solusi menyeluruh yang dapat merangkul semua lapisan masyarakat agar stratifikasi sosial dapat berperan dalam memperbaiki, bukan memperburuk, kualitas hidup masyarakat. (Armansyah dkk., 2024).

Negara Indonesia masih terlihat dalam stratifikasi sosial, diantaranya, *Pertama*, Kesenjangan Ekonomi. Stratifikasi sosial memperparah ketimpangan pendapatan, di mana orang yang berada di kelas atas memiliki penghasilan jauh lebih besar dibandingkan dengan kelas bawah. Sehingga kesenjangan ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, memperkuat kemiskinan dan ketidakadilan. *Kedua*, Diskriminasi Berdasarkan Kelas Sosial. Masalahnya, Stereotip dan prasangka terhadap orang dari kelas sosial rendah mengakibatkan diskriminasi, baik dalam lingkungan kerja, pendidikan, maupun interaksi sosial sehari-hari. Dampaknya, diskriminasi ini membuat kelas sosial bawah kesulitan untuk meningkatkan status mereka, bahkan jika mereka memiliki keterampilan atau keinginan untuk melakukannya, sehingga memperpanjang lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan. (Sari & Yasin, 2024).

Ketiga, Mobilitas Sosial yang Terbatas. Stratifikasi sosial yang ketat dapat membatasi mobilitas sosial, yaitu kemampuan individu untuk meningkatkan status sosial atau ekonomi masyarakat. Dampaknya Anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin cenderung tetap berada di posisi yang sama, karena kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, jaringan sosial, dan sumber daya lainnya yang memungkinkan mobilitas. *Keempat*, Akses Pendidikan yang Tidak Merata. Pendidikan merupakan jalan utama menuju mobilitas sosial, namun aksesnya seringkali terbatas bagi kelompok sosial yang lebih rendah. Akibatnya, stratifikasi sosial terus bertahan dari generasi ke generasi, karena kelompok ekonomi tinggi dapat memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada anak-anak mereka, sementara kelas bawah terhalang oleh biaya dan fasilitas pendidikan yang terbatas. (Alfina & Suciptaningsih, 2024).

Kelima, Ketidaksetaraan dalam Akses Layanan Kesehatan. Kelas sosial yang lebih rendah seringkali memiliki akses yang lebih sedikit ke fasilitas kesehatan yang memadai, seperti perawatan preventif dan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini menyebabkan kelas bawah memiliki kondisi kesehatan yang lebih buruk, angka kematian yang lebih tinggi, dan kualitas hidup yang lebih rendah, memperburuk kondisi stratifikasi sosial. *Keenam*, Ketidakstabilan Sosial dan Potensi Konflik. Ketimpangan sosial yang tinggi sering kali memicu ketidakpuasan dan perasaan tidak

adil di kalangan kelas bawah, yang bisa memicu ketidakstabilan sosial. Ketidakpuasan ini bisa menimbulkan konflik atau kerusuhan sosial yang mengancam stabilitas ekonomi dan politik, serta menghambat kemajuan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. (Yusuf, 2024).

Ketujuh, Ketergantungan Kelas Bawah Pada Bantuan Sosial. Pada masyarakat yang sangat terstratifikasi, kelas bawah seringkali sangat bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ketergantungan ini memperkuat posisi kelas bawah sebagai "penerima" daripada "kontributor", memperkuat pandangan bahwa mereka tidak dapat berfungsi mandiri dan melemahkan upaya menuju kemandirian ekonomi. *Kedelapan*, Pengaruh Budaya dan Kapasitas Sosial yang tidak merata. Orang di kelas sosial yang lebih tinggi memiliki lebih banyak kapital budaya dan sosial, seperti akses terhadap jaringan profesional, keterampilan yang lebih beragam, dan pemahaman sosial yang berbeda. Modal sosial ini meningkatkan peluang mereka untuk tetap berada di atas dan memperlemah kemungkinan bagi kelas sosial bawah untuk dapat menyaingi atau memasuki kelas atas. (Maulidar, 2018).

Masalah-masalah stratifikasi sosial ini membutuhkan solusi menyeluruh yang dapat merangkul semua lapisan masyarakat agar stratifikasi sosial dapat berperan dalam memperbaiki, bukan memperburuk, kualitas hidup masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang rumit dalam mengubah stratifikasi sosial. Pendidikan bisa menjadi alat mobilitas sosial tetapi juga mampu mempertahankan atau bahkan memperkuat serta mengubah sehingga menjadi solusi dalam ketimpangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka. Metode pustaka berperan penting dalam memahami konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu yang terkait dengan bagaimana stratifikasi sosial terbentuk, bekerja, serta dampaknya dalam masyarakat. (Darmalaksana, 2020). Langkah pertama adalah mengumpulkan literatur yang relevan mengenai stratifikasi sosial, termasuk teori, konsep dasar, dan hasil penelitian empiris sebelumnya. Sumber yang digunakan bisa berupa buku teori sosiologi, jurnal ilmiah, laporan dari lembaga penelitian, serta artikel yang terpublikasi di platform akademik. Selanjutnya Mengidentifikasi dan memahami teori-teori utama yang menjelaskan stratifikasi sosial. Kemudian berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, peneliti kemudian mengembangkan kerangka teoretis dan hipotesis untuk penelitian. (Ardiansyah dkk., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerataan Akses

Pemerataan akses dalam konteks stratifikasi sosial adalah upaya untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa setiap individu atau kelompok, terlepas dari kelas atau posisi sosial mereka, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan

layanan sosial.(Maunah, 2015). Pemerataan akses menjadi penting karena ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ini sering memperparah stratifikasi sosial, di mana kelompok yang lebih mampu secara ekonomi atau memiliki status sosial lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sementara kelompok yang kurang mampu terus berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. (Mardizal dkk., 2024).

Bidang utama yang menjadi fokus dalam pemerataan akses untuk mengurangi dampak stratifikasi sosial: *Pertama*, Pemerataan Akses Pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara utama untuk mobilitas sosial, namun seringkali akses terhadap pendidikan berkualitas hanya tersedia bagi kelompok ekonomi atas. Meningkatkan kualitas sekolah negeri, memberikan beasiswa, menyediakan sekolah di daerah terpencil, dan meluncurkan program subsidi pendidikan. Selain itu, pemerintah juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan dan kursus vokasional untuk memberikan kesempatan yang lebih merata bagi setiap lapisan masyarakat.(Afriansyah, 2022). Dengan akses pendidikan yang merata, individu dari kelas sosial yang lebih rendah memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pekerjaan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi masyarakat.

Kedua, Pemerataan Akses Layanan Kesehatan. Kesehatan yang baik adalah kebutuhan dasar, namun akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sering kali terbatas pada kelompok berpendapatan tinggi. Mengembangkan sistem jaminan kesehatan nasional yang inklusif, menyediakan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil, serta memastikan ketersediaan obat dan tenaga medis yang terjangkau bagi masyarakat miskin.(Alif dkk., 2023). Dengan akses kesehatan yang lebih merata, semua lapisan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang layak, meningkatkan produktivitas mereka, dan mengurangi beban ekonomi akibat biaya kesehatan yang tinggi.

Ketiga, Pemerataan Akses Ekonomi dan Pekerjaan. Pekerjaan dan pendapatan yang stabil adalah faktor utama yang memengaruhi status sosial seseorang. Namun, kelas sosial yang lebih rendah sering kali hanya memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi. Pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan lapangan kerja baru, memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal, serta memastikan kebijakan upah minimum yang adil. Program kredit mikro juga dapat membantu masyarakat kelas bawah dalam mengembangkan usaha kecil.(Restiyanto, Dumadi Tri & Nanang Yusroni, 2006). Dengan akses ekonomi yang lebih terbuka, individu dari berbagai lapisan sosial memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Keempat, Pemerataan Akses Perumahan dan Layanan Sosial. Perumahan yang layak merupakan bagian dari kesejahteraan sosial, namun tingginya harga rumah dan sewa cenderung menyingkirkan kelompok berpendapatan rendah dari akses ke perumahan layak. Penyediaan perumahan yang terjangkau, program bantuan sewa, serta perumahan subsidi adalah langkah-langkah yang dapat membantu masyarakat

kurang mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak.(Putri, Fauziah dkk., 2024). Dengan akses terhadap perumahan yang layak, masyarakat dapat hidup di lingkungan yang sehat dan aman, yang berkontribusi pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Kelima, Pemerataan Akses pada Keadilan dan Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum yang adil harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara, tetapi dalam kenyataannya akses terhadap bantuan hukum seringkali hanya dimiliki oleh kelompok yang lebih mampu. Menyediakan layanan bantuan hukum gratis atau bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperkuat keadilan dalam proses peradilan agar tidak terjadi diskriminasi.(Abdi, 2024). Setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan, ketimpangan yang disebabkan oleh diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan bisa berkurang, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil.

Keenam, Pemerataan Akses Teknologi dan Informasi. Teknologi dan informasi adalah elemen penting dalam era digital, namun akses terhadapnya seringkali terbatas pada kelompok berpendapatan tinggi. Pemerintah dapat menyediakan internet murah dan membangun infrastruktur digital di wilayah terpencil. Selain itu, program pelatihan literasi digital dapat membantu masyarakat kurang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.(Abdul Latip, 2020). Dengan akses terhadap teknologi, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengakses informasi yang berguna, peluang pekerjaan online, dan layanan digital lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerataan akses dalam berbagai bidang sangat penting untuk mengurangi ketimpangan yang diakibatkan oleh stratifikasi sosial. Dengan memastikan akses yang setara pada pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, perlindungan hukum, dan teknologi, setiap lapisan masyarakat dapat memiliki kesempatan yang lebih adil untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Pemerataan akses bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga memerlukan partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat luas agar tercipta lingkungan sosial yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi masyarakat.

Reformasi Kurikulum

Reformasi kurikulum merupakan salah satu cara strategis untuk mengatasi ketimpangan yang disebabkan oleh stratifikasi sosial. Pendidikan yang inklusif dan relevan bagi semua lapisan masyarakat dapat membantu mengurangi perbedaan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap siswa, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka.(Suryono, 2019). Kurikulum yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan mobilitas sosial dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting bagi setiap peserta didik, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan status sosial masyarakat.(Abdah, 2019).

Reformasi kurikulum dapat berperan dalam mengurangi dampak stratifikasi sosial dengan cara, *Pertama*, Memastikan Kurikulum yang Inklusif dan Relevan. Kurikulum yang terlalu akademis atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat luas cenderung menguntungkan siswa dari keluarga yang lebih kaya atau berpendidikan tinggi, sementara siswa dari keluarga kurang mampu tertinggal. Reformasi ini Menciptakan kurikulum yang inklusif dan relevan dengan memasukkan materi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan semua peserta didik, termasuk pendidikan vokasional dan keterampilan hidup, dapat membuat pendidikan lebih dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.(Abdah, 2019). Semua ini berdampak pada siswa dari berbagai latar belakang sosial dapat memperoleh keterampilan yang relevan untuk pekerjaan, kewirausahaan, atau studi lanjutan, sehingga meningkatkan peluang masyarakat dan siswa untuk mobilitas sosial.

Kedua, Mengintegrasikan Pendidikan Karakter dan Keterampilan Hidup. Pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, dan empati, serta keterampilan hidup seperti pengelolaan keuangan, komunikasi, dan berpikir kritis, sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Reformasi dalam memperkuat pendidikan karakter dan keterampilan hidup di semua tingkatan sekolah untuk membantu siswa menjadi individu yang mandiri, beretika, dan siap menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan nyata. Dampaknya Keterampilan hidup dan karakter yang kuat membantu siswa untuk berkembang dalam masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial mereka, dan meningkatkan peluang untuk keberhasilan di tempat kerja atau dalam usaha.(Abidin, 2021).

Ketiga, Mengintegrasikan Pendidikan Vokasional di Tingkat Sekolah Menengah. Pendidikan vokasional yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan kerja dapat mengurangi ketergantungan pada pendidikan tinggi yang biasanya lebih terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Menyediakan program vokasional di sekolah menengah dengan kualitas yang baik dan kesempatan magang di perusahaan. Ini memungkinkan siswa yang mungkin tidak melanjutkan ke perguruan tinggi untuk tetap memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Dampaknya siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dapat memperoleh keterampilan yang diminati di pasar kerja dan, karenanya, memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi masyarakat.(Haedari, 2013).

Keempat, Penyediaan Akses Pendidikan Digital. Era digital, akses teknologi menjadi faktor penting dalam proses belajar. Ketimpangan akses terhadap teknologi dan internet seringkali memperburuk ketidaksetaraan sosial dalam pendidikan. Reformasi dalam hal ini mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum, menyediakan perangkat elektronik, dan memperluas akses internet di wilayah terpencil dan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Dampaknya dengan akses digital yang merata, semua siswa, termasuk yang dari kelas sosial bawah, dapat memperoleh informasi dan materi belajar yang sama, serta berpartisipasi dalam kelas daring atau program belajar yang sama dengan siswa lain.(Affandi & Tantra, 2022).

Kelima, Mengurangi Penekanan pada Prestasi Akademik Semata. Sistem pendidikan yang berfokus hanya pada nilai akademik dapat menimbulkan diskriminasi terhadap siswa yang kurang berprestasi secara akademis, yang mungkin berasal dari keluarga dengan keterbatasan sumber daya. Reformasi dalam Mengembangkan kurikulum yang juga menilai bakat, minat, dan keterampilan non-akademis, seperti seni, olahraga, kreativitas, dan kemampuan interpersonal. Dampaknya Mengurangi tekanan akademik membuka peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial untuk menunjukkan kemampuan mereka di berbagai bidang. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara menyeluruh dan membuka peluang karier yang sesuai dengan kemampuan. (Ahmad, 2021).

Keenam, Pendidikan Kesadaran Sosial dan Keadilan Sosial. Pendidikan yang menekankan pada kesadaran sosial dan keadilan sosial dapat membantu siswa memahami isu-isu ketimpangan dan diskriminasi. Reformasi disini adalah memasukkan modul tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, serta pentingnya empati dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum. Dampaknya siswa lebih memahami kompleksitas ketidaksetaraan sosial dan lebih terdorong untuk berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan di masyarakat mereka. Hal ini menciptakan generasi yang lebih peduli dan berpikiran terbuka dalam memajukan kesetaraan sosial. (Suryono, 2019).

Ketujuh Memperkuat Pendidikan Guru. Guru memegang peran kunci dalam menyampaikan kurikulum yang inklusif dan mendorong siswa untuk meraih potensi tanpa melihat latar belakang sosial. Dengan reformasi mengadakan pelatihan yang memfokuskan pada pendidikan inklusif, sensitivitas terhadap ketimpangan sosial, dan kemampuan mendukung siswa dengan latar belakang yang beragam. Dampaknya guru yang kompeten dalam menghadapi siswa dari berbagai kelas sosial dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih adil, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang merata dan inklusif. (Armansyah dkk., 2024).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Reformasi kurikulum dapat menjadi salah satu jalan penting untuk mengurangi dampak stratifikasi sosial dalam pendidikan. Dengan kurikulum yang inklusif, relevan, dan berfokus pada pengembangan keterampilan, pendidikan dapat menjadi sarana mobilitas sosial bagi siswa dari berbagai kelas sosial. Reformasi ini tidak hanya memperluas kesempatan bagi siswa untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka tetapi juga mendorong masyarakat yang lebih adil, di mana akses dan kesempatan pendidikan tidak lagi ditentukan oleh status sosial atau ekonomi.

Kebijakan Inklusi Sosial

Kebijakan inklusi sosial dalam stratifikasi sosial bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan atau kurang beruntung, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Inklusi sosial menjadi sangat penting dalam mengurangi dampak negatif stratifikasi sosial, seperti

ketimpangan ekonomi, pengucilan sosial, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Dengan kebijakan inklusi sosial, masyarakat bisa menjadi lebih adil dan harmonis karena memberikan kesempatan yang setara kepada semua anggotanya untuk berkembang dan berkontribusi.(Haryanti, 2019).

Strategi kebijakan inklusi sosial dalam mengatasi dampak stratifikasi sosial: *Pertama*, Kebijakan Pendidikan yang Inklusif. Pendidikan adalah kunci mobilitas sosial, namun sering kali anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok terpinggirkan memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Solusinya atau kebijakan memberikan beasiswa, memperluas program sekolah inklusif yang menerima siswa dari berbagai latar belakang, mengurangi biaya pendidikan, dan menyediakan fasilitas pendidikan di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah. (Ra'is, 2018). Dampaknya dengan akses pendidikan yang setara, semua individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Hal ini berdampak pada peningkatan mobilitas sosial di masyarakat.

Kedua, Kebijakan Kesempatan Kerja yang Setara. Pasar kerja sering kali menjadi tempat reproduksi stratifikasi sosial, di mana individu dari kelas atas lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang baik, sementara dari kelas bawah sulit mendapat kesempatan yang sama. Kebijakan dan solusinya adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada pekerja berpendidikan rendah, memastikan upah minimum yang layak, dan menciptakan program kerja inklusif yang memprioritaskan kelompok terpinggirkan.(Pattinasarany, 2016). Dampaknya dengan akses yang lebih luas terhadap pekerjaan yang layak, individu dari semua lapisan sosial dapat memiliki pendapatan yang memadai, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, dan meningkatkan status ekonomi masyarakat.

Ketiga, Kebijakan Akses Terhadap Layanan Kesehatan. Kesehatan yang baik adalah hak dasar, namun akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sering kali terbatas pada kelompok yang mampu secara finansial. Kebijakan dalam hal ini adalah menerapkan sistem jaminan kesehatan universal atau subsidi kesehatan bagi kelompok berpenghasilan rendah, serta memperluas fasilitas kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil. Dampaknya Ketika akses layanan kesehatan merata, semua orang dapat memperoleh perawatan yang mereka butuhkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas mereka dan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.(Handayani, Sri, 2016).

Keempat, Kebijakan Perumahan yang Terjangkau. Kepemilikan atau akses terhadap perumahan yang layak seringkali menjadi simbol status sosial yang tinggi. Tanpa akses terhadap perumahan yang terjangkau, kelompok berpenghasilan rendah akan kesulitan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Kebijakan ini merupakan program perumahan rakyat yang terjangkau, kredit rumah bersubsidi, dan bantuan sewa bagi keluarga miskin. Dampaknya dengan akses pada perumahan yang layak dan terjangkau, kelompok berpenghasilan rendah dapat hidup di lingkungan yang

sehat dan stabil, yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental.(Sadiyah & Arianti, 2012)

Kelima, Kebijakan Perlindungan Sosial dan Bantuan Sosial. Bantuan sosial bertujuan untuk melindungi kelompok yang paling rentan dari efek ketidakpastian ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh stratifikasi sosial. Menyediakan bantuan langsung, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan subsidi energi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, serta menyediakan perlindungan sosial seperti asuransi tenaga kerja bagi pekerja informal. Dampaknya Kebijakan ini memberikan jaring pengaman ekonomi yang dapat mencegah kelompok berpenghasilan rendah jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim saat menghadapi krisis, membantu mereka tetap stabil dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.(Pebri, 2022).

Keenam, Kebijakan Partisipasi Politik yang Inklusif. Partisipasi politik yang inklusif memungkinkan kelompok masyarakat yang kurang terwakili untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Meningkatkan akses pemilu bagi semua warga, memberi kuota atau representasi bagi kelompok minoritas atau kelompok marjinal, serta membentuk dewan atau komite masyarakat yang melibatkan berbagai lapisan sosial. Dampaknya dengan kebijakan partisipasi politik yang lebih luas, kebijakan yang dihasilkan lebih memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat, tidak hanya untuk kelompok elit. Hal ini membantu mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kohesi sosial.(Maulidar, 2018).

Ketujuh, Kebijakan Anti-Diskriminasi dan Kesetaraan Peluang. Diskriminasi berdasarkan status sosial, suku, agama, jenis kelamin, atau faktor lain dapat memperparah stratifikasi sosial, sehingga menghambat kelompok-kelompok tertentu untuk berkembang. Memperkuat undang-undang anti-diskriminasi, menyediakan pelatihan kesetaraan peluang di tempat kerja dan institusi pendidikan, serta menerapkan kebijakan afirmatif untuk kelompok yang rentan atau tertinggal. Dampaknya kebijakan anti-diskriminasi menciptakan lingkungan yang adil dan memberi kesempatan yang setara kepada semua individu, sehingga ketimpangan sosial dapat berkurang, dan masyarakat yang lebih inklusif dapat terwujud.(Dewi Setyowati & Sisca Muji Rahayu, 2021).

Kedelapan, Kebijakan Akses Teknologi dan Infrastruktur Digital. Era digital saat ini, akses terhadap teknologi dan internet menjadi penting dalam mengakses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Menyediakan internet murah atau gratis untuk daerah pedesaan atau masyarakat berpenghasilan rendah, membangun infrastruktur digital di wilayah terpencil, serta menyediakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat. Dampaknya akses digital yang merata membantu individu dari seluruh lapisan sosial untuk meningkatkan keterampilan mereka, mendapatkan peluang pekerjaan, dan mengakses informasi yang dapat mengubah kehidupan mereka, sehingga memperkecil jurang ketimpangan.(Abdul Latip, 2020).

Uraian di atas dapat diartikan bahwa kebijakan inklusi sosial adalah pendekatan yang sangat penting untuk mengatasi ketimpangan yang muncul dari

stratifikasi sosial. Kebijakan ini memberikan akses yang lebih merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, partisipasi politik, dan teknologi bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, kebijakan ini dapat memfasilitasi mobilitas sosial dan mendorong masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Pendanaan dan Beasiswa

Pendanaan dan beasiswa adalah langkah penting dalam mengatasi ketimpangan yang disebabkan oleh stratifikasi sosial, khususnya dalam bidang pendidikan. Melalui bantuan keuangan ini, siswa dari berbagai latar belakang sosial, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini menjadi alat mobilitas sosial, membantu siswa dari kelas bawah mencapai pendidikan tinggi dan membuka akses menuju pekerjaan yang lebih baik, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan yang diwariskan antar-generasi.

Berikut adalah cara pendanaan dan beasiswa dapat mempengaruhi dan mengurangi dampak stratifikasi sosial, diantaranya, *Pertama*, Beasiswa Berdasarkan Kebutuhan Ekonomi. Beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi diberikan khusus bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Beasiswa ini sering kali menutupi biaya sekolah, buku, transportasi, dan biaya hidup lainnya yang tidak terjangkau oleh keluarga. Tujuan membantu siswa berprestasi dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya. Dampaknya dengan beasiswa ini, siswa yang kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan siswa dari keluarga mampu, sehingga peluang mereka untuk mobilitas sosial meningkat, dan ketimpangan pendidikan dapat diminimalkan. (Gustina & Safikha, 2022).

Kedua, Program Pendanaan Sekolah Gratis. Sekolah gratis atau berbiaya rendah adalah bentuk subsidi pemerintah atau lembaga lainnya yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan dasar hingga menengah secara gratis untuk siswa dari seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari status ekonomi keluarganya, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dasar yang berkualitas. Dampak dengan pendanaan sekolah gratis, anak-anak dari kelas sosial bawah dapat mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas tanpa terbebani biaya. Ini membantu mengurangi ketimpangan pendidikan pada tahap awal dan membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat di masa depan. (Kahar, 2021).

Ketiga, Beasiswa Akademik dan Non-Akademik. Beasiswa akademik dan non-akademik adalah bantuan pendidikan yang diberikan berdasarkan prestasi dalam bidang akademik, seni, olahraga, atau keterampilan lainnya. Tujuannya memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, yang menunjukkan potensi besar meskipun berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Dampak beasiswa ini memungkinkan siswa berbakat dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu, ini juga menciptakan lingkungan yang menghargai beragam kemampuan, tidak hanya kemampuan akademik, yang dapat mengurangi ketimpangan sosial.(Kahar, 2021).

Keempat, Pendanaan untuk Pendidikan Vokasional. Pendidikan vokasional atau keterampilan kerja memungkinkan siswa untuk mempelajari keterampilan praktis yang langsung relevan di pasar kerja, namun sering kali membutuhkan biaya yang cukup besar. Tujuannya memperluas akses ke pendidikan keterampilan bagi siswa yang mungkin tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi namun tetap membutuhkan keterampilan untuk pekerjaan yang layak. Dampaknya dengan pendanaan ini, siswa dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan yang diperlukan untuk pekerjaan yang stabil, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial yang terkait dengan pekerjaan dan pendapatan.(Hidayat, Yayat & Hartanti, 2019).

Kelima, Beasiswa untuk Pendidikan Tinggi dan Luar Negeri. Pendidikan tinggi dan studi luar negeri sering kali dianggap sebagai jalur langsung menuju pekerjaan bergaji tinggi dan kesempatan mobilitas sosial yang signifikan, namun biayanya sangat tinggi. Tujuan memberikan kesempatan bagi siswa dari kelas sosial bawah untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau luar negeri, yang dapat memperbesar peluang karier. Dampak beasiswa ini memungkinkan individu dari keluarga kurang mampu untuk mengejar pendidikan tinggi yang dapat membuka pintu bagi pekerjaan berpenghasilan tinggi, yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan pendapatan dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat.(Gustina & Safikha, 2022).

Keenam, Pendanaan untuk Pendidikan Anak di Daerah Tertinggal. Siswa di daerah tertinggal sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Tujuan Menyediakan bantuan dana khusus bagi sekolah dan siswa di daerah tertinggal agar mereka dapat menikmati fasilitas pendidikan yang sama seperti di daerah perkotaan. Dampaknya, anak-anak dari daerah tertinggal mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mengejar karier di masa depan, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup mereka dan membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.(Syafii, 2018).

Ketujuh, Program Bantuan dan Subsidi Pendidikan dari Pemerintah. Bantuan atau subsidi pendidikan adalah bentuk bantuan pemerintah yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada siswa yang membutuhkan, seperti melalui bantuan uang saku, bantuan alat belajar, atau potongan biaya sekolah. Menjamin bahwa tidak ada siswa yang putus sekolah hanya karena masalah keuangan. Dampaknya program ini memberikan akses yang lebih luas kepada siswa dari kelompok ekonomi bawah untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga selesai, sehingga membantu meningkatkan peluang mereka untuk mobilitas sosial di masa depan.(Aliyah dkk., 2020).

Kedelapan, Kombinasi Program Beasiswa dengan Pelatihan Keterampilan. Program ini menggabungkan beasiswa dengan pelatihan keterampilan tambahan,

seperti keterampilan digital, bahasa asing, atau kewirausahaan, untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi siswa penerima beasiswa. Tujuannya memberikan lebih dari sekadar bantuan keuangan dengan melengkapi penerima beasiswa dengan keterampilan praktis yang berguna di dunia kerja. Dampaknya Program ini meningkatkan keterampilan yang relevan untuk pekerjaan, membantu siswa siap bersaing di pasar kerja, dan meningkatkan mobilitas sosial mereka dengan cara yang berkelanjutan. (Aliyyah dkk., 2020).

Proposisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendanaan dan beasiswa adalah alat penting dalam mengurangi ketimpangan yang muncul dari stratifikasi sosial, khususnya dalam akses terhadap pendidikan. Dengan memberikan bantuan finansial untuk pendidikan dasar hingga tinggi, program ini memastikan bahwa siswa dari kelas sosial bawah memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan kombinasi kebijakan pendanaan dan beasiswa yang tepat, masyarakat dapat lebih inklusif, memungkinkan individu dari semua kelas sosial untuk mencapai potensi penuh mereka, dan dengan demikian memperkuat kohesi serta keadilan sosial.

KESIMPULAN

Peran pendidikan dalam mengubah stratifikasi sosial memiliki empat kegiatan, diantaranya, *Pertama*, Pemerataan Akses. Kegiatan ini meliputi, diantaranya: pemerataan akses pendidikan, pemerataan akses layanan kesehatan, pemerataan akses ekonomi dan pekerjaan, pemerataan akses perumahan dan layanan sosial, pemerataan akses pada keadaan dan perlindungan hukum, dan pemerataan akses teknologi dan informasi. reformasi kurikulum. *Kedua*, Reformasi Kurikulum. Memastikan kurikulum yang inklusif dan relevan, mengintegrasikan pendidikan karakter dan keterampilan hidup, mengintegrasikan pendidikan vokasional di tingkat sekolah menengah, menyediakan akses pendidikan digital, mengurangi penekanan pada prestasi akademik semata, pendidikan kesadaran sosial dan keadilan sosial dan memperkuat pendidikan guru. *Ketiga*, Kebijakan Inklusi Sosial. Kebijakan ini meliputi, kebijakan pendidikan yang inklusif, kebijakan kesempatan kerja yang setara, kebijakan akses terhadap layanan kesehatan, kebijakan perumahan yang terjangkau, kebijakan perlindungan sosial dan bantuan sosial, kebijakan partisipasi politik yang inklusif, kebijakan anti-diskriminasi dan kesetaraan peluang dan kebijakan akses teknologi dan infrastruktur digital. *Keempat*, Pendanaan dan Beasiswa. Pendanaan dan Beasiswa ini meliputi, beasiswa berdasarkan kebutuhan ekonomi, program pendanaan sekolah gratis, beasiswa akademik dan non akademik, pendanaan untuk pendidikan vokasional, beasiswa untuk pendidikan tinggi dan luar negeri, pendanaan untuk pendidikan anak daerah tertinggal, program dan bantuan subsidi pendidikan dari pemerintah, dan kombinasi program beasiswa dengan pelatihan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdah, M. G. (2019). Ragam Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). *Fondatia*, 3(1).
- Abdi, R. M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang* [Diploma, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/478757/>
- Abdul Latip. (2020). Peran Literasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19. *EduTeach : Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran*, 1(2), 108–116. <https://doi.org/10.37859/eduteach.v1i2.1956>
- Abidin, Z. (2021). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Berbasis Agama, Budaya, Dan Sosiologi. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*. http://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/167
- Affandi, L. H., & Tantra, D. K. (2022). Implication of Constructivism Philosophy on Teacher Professional Development: A Literature Review. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 12(2), hal. 809.
- Afriansyah, A. R. (2022). *Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara* [Diploma, IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/10208/>
- Ahmad, M. (2021). Management of facilities and infrastructure in schools. *Akademika: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(01), 93–112.
- Aji, R. H. S. (2016). *Stratifikasi sosial dan kesadaran kelas*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31358>
- Alfina, D. G., & Suciptaningsih, O. A. (2024). Penerapan Microsite Pada Materi Status, Peran Sosial, Diferensiasi Dan Stratifikasi Sosial Untuk Meningkatkan Literasi Digital Serta Literasi Budaya Dan Kewarganegaraan. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.13979>
- Alif, I. S., Karnay, S., & Amir, A. S. (2023). Strategi Komunikasi Kesehatan Penanganan Stunting (studi Pada Kelurahan Watang Bacukiki Kota Parepare). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 66–89. <https://doi.org/10.14710/interaksi.12.1.66-89>
- Aliyyah, R. R., Ulfah, S. W., Herawati, E. S. B., Rachmadtullah, R., & Asmara, A. S. (2020). Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(1), 37–54. <https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1282>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Armansyah, A., Noviarani, D., & Rusyiana, R. (2024). Implementasi Sistem Pendidikan Dalam Mengatasi Ketidaksetaraan: Pengaruh Terhadap Stratifikasi Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11601>

- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>
- Dewi Setyowati, D. S. & Sisca Muji Rahayu. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 21(2), hal. 80.
- Gustina, D., & Safikha, Lady. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa Dengan Metode Saw Pada SMA Negeri 2 Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika (TEKINFO)*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.37817/tekinfo.v23i1.1874>
- Haedari, A. (2013). *Pendidikan Agama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang.
- Handayani, Sri. (2016). Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas baturetno. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 14(1), hal. 45-47.
- Haryanti, W. T. (2019). Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>
- Hidayat, Yayat, & Hartanti. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dalam tata cara perpajakan terhadap penyelesaian tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(2), hal. 300-302.
- Kahar, A. (2021). *Beasiswa Pemutus Mata Rantai Kemiskinan*. Indonesia Emas Group.
- Lue, & Palupi, Y. (2022). Ilmu Sosial Dasar. *BUKU Karya Dosen IKIP PGRI Wates*, 1(1), Article 1. <https://repository.ipw.ac.id/index.php/buku-dosen/article/view/29>
- Mardizal, J., Sanusi, Irsyad, & Ramatni, A. (2024). *Sosiologi Pendidikan*. Jonni Mardizal.
- Maulidar, F. (2018). *Habib dan Teuku: Stratifikasi Sosial dan Kontestasi Politik dalam Masyarakat Nagan Raya* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://library.ar-raniry.ac.id/>
- Maunah, B. (2015). Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.21274/taalum.2015.3.1.19-38>
- Pattinasarany, I. R. I. (2016). *Stratifikasi Dan Mobilitas Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pebri, I. (2022). *Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)* [Masters, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/11578/>
- Putri, Fauziah, Nici Amanda, Istiqamah Fitrah, Fitri Mayang Sari, & Helena Yolanda Putri. (2024). Reformasi birokrasi dalam pengawasan pelayanan publik di kota padang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), hal. 104.
- Ra'is, D. U. (2018). Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa. *REFORMASI*, 7(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v7i2.803>

- Restiyanto, Dumadi Tri, & Nanang Yusroni. (2006). Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Akibat Terperangkap Kegagalan Pendekatan Teori Ekonomi Pembangunan. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), hal. 180.
- Sadiyah, Y. H., & Arianti, F. (2012). *Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang* [Other, Fakultas Ekonomika dan Bisnis]. <http://eprints.undip.ac.id/37351/>
- Sari, F. A., & Yasin, M. (2024). Pendidikan Dan Stratifikasi Sosial: Kebijakan dan Praktek Pendidikan Dalam Mengurangi Stratifikasi Sosial di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 2(3), Article 3.
- Suryono, A. (2019). *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Bumi Aksara.
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v4i2.1535>
- Yusuf, M. (2024). Stratafikasi Sosial dan Korelasinya Dengan Perilaku Hukum. *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.19>.